



Jangan Takut Penegak Hukum

Dalam rapat ini membahas hal-hal mengenai daya serap anggaran. Menteri Perekonomian menyampaikan situasi ekonomi saat ini, juga memperjelas tentang paket-paket kebijakan. Terkait masalah daya serap anggaran kata Wagub, sudah dijelaskan menteri perekonomian. Bahkan Menkopolkam sendiri meminta kepada pemerintah daerah, jangan ada ketakutan lagi dengan penegakan hukum, sepanjang menjalankan tugas sesuai aturan. "Jadi selama menjalankannya sesuai dengan aturan, maka jangan takut. Sehingga tidak mengganggu penyerapan anggaran dan kesejahteraan masyarakat," ungkap Christiandy, Jumat (23/10). Menurut Wagub, sesuai arahan menteri, apabila proyek sedang berjalan, mestinya penegak hukum jangan masuk dulu. Sebelum BPK dan BPKP memberikan penilaian. "Kalau masuk dulu, maka akan mengganggu proses berjalannya proyek. Hal tersebut disampaikan di hadapan Kapolri dan Kejaksaan Agung," tegasnya. Selain itu menurut Wagub, Menkopolkam mengatakan, kalau BPK sudah melakukan pemeriksaan,

pastinya pemerintah diberikan waktu sekitar 60 hari untuk mengklarifikasi. Sebelum masa itu, mestinya tidak ada kepolisian ataupun kejaksaan yang datang. Sebab akan menyendat proses proyeknya. Kalau sudah diperiksa BPK ada temuan penyimpangan, maka wajib ditindak secara hukum. "Jadi Pak Menteri minta, semua yang sudah dianggarkan bisa dijalankan dengan baik sesuai aturan. Malah Pak Menteri berulang kali menyampaikan, dirinya akan melindungi kalian, yang memang menjalankan dengan sesungguhnya dan baik. Tapi kalau yang melanggar, beliau juga yang akan menindaknya," kata Christiandy. Sementara Presiden Jokowi menyampaikan kondisi perekonomian sekarang ini bukan krisis, tapi hanya perlambatan pertumbuhan perekonomian. "Perekonomian kita masih tumbuh sekitar empat persen lebih sampai hari ini. Diprediksi sampai akhir tahun sekitar 4,5 persen sampai lima persen pertumbuhan perekonomian," ujar Wagub.

Laporan: Isfiansyah
Editor: Hamka Saptono